



PT MRT Minta tambahan Rp 1,3 T

LAMBATNYA pembangunan proyek transportasi massal *rapid transit/moda raya* terpadu (MRT) mengakibatkan biaya membengkak. PT MRT Jakarta meminta dana tambahan Rp1,3 triliun kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menutup pembengkakan biaya tersebut.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan (Asbang) DKI Mara Oloan Siregar mengatakan keterlambatan proyek MRT itu terjadi pada pengerjaan jalur di Jalan Raya Fatmawati, Jakarta Selatan. Menurutnya, dana yang diajukan itu juga untuk memenuhi peningkatan standar baja rangka stasiun dan jalur MRT. Selain itu, sebagian akan digunakan untuk menerapkan sistem bangunan tahan gempa.

Meski demikian, permintaan dana tambahan tersebut tidak lantas disetujui pemerintah provinsi, sebab angkanya didasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan konsultan Jepang. Oloan menegaskan MRT harus memiliki perhitungan sendiri yang bisa diajukan kepada Pemprov.

"Memang konsultan itu yang mengajukan kepada MRT, kemudian MRT mengajukan ke kami. Namun, kami meminta mereka (MRT) menghitung dahulu rinciannya. Mereka (MRT) minta secepatnya (permohonan diproses). Kami katakan, kalau mereka segera menghitung (sendiri), kami juga akan cepat memberikan," ujar Oloan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono juga membenarkan permintaan dana un-

tuk menutup pembengkakan biaya. Seperti halnya Oloan, ia akan menunggu hasil perhitungan yang dilakukan MRT. Jika jadi diberikan, dana tambahan itu akan diajukan di anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P). "Nanti bisa kita ajukan di APBD-P," kata Heru.

Lambatnya pembangunan proyek MRT di Jalan Raya Fatmawati disebabkan proses pembebasan lahan di lokasi itu mangkrak. Warga pemilik lahan di wilayah tersebut menuntut nilai ganti rugi tinggi.

Terlambat dibangun

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pembangunan MRT untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota terlambat. Menurutnya, seharusnya pembangunan transportasi massal itu dilakukan sejak 28 tahun lalu.

Ia menilai dahulu MRT tidak dibangun karena tidak ada yang berani memulai. "Seharusnya MRT bisa dibangun 28 tahun silam. Namun (saat itu) enggak ada yang kepikiran ke sana," ujar Basuki atau Ahok.

Kemacetan lalu lintas yang kini menghantui Jakarta, ujarnya, disebabkan kelalaian dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi umum, juga dampak penjualan kendaraan pribadi yang sangat mudah sehingga pasokan mobil dan sepeda motor tinggi.

"Yang membayar pajak saja sekitar 10 juta kendaraan. Belum lagi yang enggak bayar pajak. Bagaimana Jakarta enggak macet?" kata dia. (Put/Ssr/J-2)